

LAPORAN

**PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE
GOVERNANCE)
PELAKSANAAN GCG**

2024

PT. BPR ASIA SEJAHTERA

DAFTAR ISI

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assesement) atas Penerapan Tata Kelola	1
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	5
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR	8
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	9
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	9
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	9
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	10
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	10
G. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	11
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	11
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	12

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	12
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	13
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	14
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	14

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assesement) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jalan D.I. Panjaitan Km.9 No.1-2
Nomor Telepon	: 0771-7447004
Penjelasan Umum <p>Tata Kelola menerapkan lima prinsip dasar yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola. Tata Kelola yang baik merupakan unsur penting dalam industri perbankan dengan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Melalui implementasi prinsip prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan akan memperkuat posisi daya saing bank baik secara lokal maupun nasional, meningkatkan efisiensi ekonomis dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya sehingga bank mampu beroperasi dan tumbuh secara keberlanjutan dalam jangka panjang.</p> <p>Pelaksanaan Tata Kelola oleh bank bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi bank, memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya, mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif, melindungi kepentingan stakeholders, mendukung penetapan kebijakan BPR yang didasari oleh prinsip prinsip tata kelola. Manajemen PT. BPR Asia Sejahtera menyadari bahwa penerapan Tata Kelola yang baik merupakan suatu kewajiban mengingat bahwa BPR merupakan salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dan juga semakin meningkatnya kompleksitas usaha maka harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan tata kelola secara berkesinambungan akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.</p>	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesement) Tata Kelola <p>Hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada tahun 2024 dikategorikan ke dalam Peringkat Komposit : Peringkat 2</p>	

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesement) Tata Kelola

Faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola PT. BPR Asia Sejahtera dari segi hasil penerapan memiliki beberapa faktor positif yang mempengaruhi, seperti Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham. Direksi juga telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan rapat secara berkala dan hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selain itu, sampai dengan saat ini PT. BPR Asia Sejahtera belum terdapat benturan kepentingan dan fraud yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, senantiasa menjaga BMPK BPR agar tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan sampai dengan saat ini belum pernah melanggar atau melampaui BMPK, dan telah melakukan penyampaian Laporan-laporan kepada OJK secara tepat waktu seperti Laporan tahunan, laporan keuangan publikasi, dan Laporan Layanan Pengaduan serta menyampaikan Rencana Bisnis tahun 2025 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola PT. BPR Asia Sejahtera dari segi hasil penerapan memiliki beberapa faktor negatif yang mempengaruhi, seperti penyelesaian AYDA dan penyelesaian kredit bermasalah masih belum sesuai dengan ekspektasi stakeholders, peningkatan risk awareness dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dan Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan PT. BPR Asia Sejahtera dalam rencana bisnis 2024 belum tercapai secara keseluruhan sesuai target yang ditetapkan.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola terhadap Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera per 31 Desember 2024 masing-masing berjumlah 2 orang.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Nama : KUMALA DEWI

NIK :

Jabatan : Direktur Utama

Nama : KELLY

NIK :

Jabatan : Direktur (yang membawahkan Fungsi Kepatuhan)

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktur Utama sebagai berikut :

Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR secara efektif dan efisien. Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Dalam hal pelaksanaan proses audit baik internal maupun eksternal, Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Manajemen Risiko, fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan, fungsi Strategi Anti Fraud, dan fungsi Integritas Pelaporan Keuangan termasuk menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi diatas. Direksi wajib memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai. Direksi berkewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi. Selain itu, Direksi juga wajib bertanggungjawab atas kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan, memastikan kebenaran isi laporan keuangan serta melakukan penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank dan memastikan penerapan Strategi Anti Fraud di semua jenjang dan unit kerja BPR berjalan secara efektif.

Tugas dan Tanggungjawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sama dengan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama seperti yang telah dijelaskan diatas, namun ada beberapa hal tambahan terkait tugas dan tanggungjawab Direktur seperti menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, serta memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, maka Direktur berkewajiban mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2024, Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah menjalankan tugas dan tanggung jawab serta menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan berfokus pada hal-hal berikut :

- a. Mengevaluasi pencapaian realisasi rencana bisnis BPR secara berkala agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai target;
- b. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran kredit ;
- c. Memperhatikan Manajemen Portofolio Kredit dalam penyaluran kredit terutama kredit sindikasi agar penyaluran kredit tidak berfokus pada salah satu jenis fasilitas kredit saja;
- d. Memperhatikan debitur berkolektibilitas DPK agar tidak masuk ke dalam peningkatan NPL dan berupaya menurunkan NPL;
- e. Menyusun strategi terhadap penyelesaian AYDA dikarenakan semua AYDA yang ada telah jatuh tempo dan belum terjual;
- f. Meningkatkan kemampuan analisa kredit kepada seluruh jenjang yang berkaitan untuk menghindari kegagalan bayar yang dapat mempengaruhi NPL dan profil resiko kredit BPR;

- g. Memantau dan memperhatikan 25 debitur terbesar;
- h. Mengingatkan kepala bagian setiap unit kerja agar melakukan briefing secara berkala kepada bawahannya dan menghimbau untuk lebih teliti dan mereview semua prosedur yang berkaitan dengan unit kerjanya untuk meminimalisir Human Error yang timbul sebagai salah satu cara peningkatan kualitas SDM dan menghindari adanya temuan berulang oleh PE Audit Intern;
- i. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit;
- j. Mengawasi kegiatan operasional BPR dan melakukan dual control sebagai salah satu cara untuk Penerapan Strategi Anti Fraud dan menghimbau seluruh karyawan untuk senantiasa melakukan pekerjaan sesuai prosedur untuk menghindari terjadinya fraud;
- k. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap vendor sistem untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem;
- l. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan bank dengan memastikan kelengkapan dan kebenaran isi laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan BPR;
- m. Memantau penerapan APU, PPT, dan PPSPM dalam kegiatan operasional BPR;
- n. Menyelesaikan komitmen kepada OJK atau instansi lainnya.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama : KIM HAN
NIK :
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : MERI
NIK :
Jabatan : Komisaris

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar BPR. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK, dan/atau otoritas lainnya. Dewan komisaris wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi wajib memastikan penerapan Strategi Anti Fraud berjalan secara efektif dan melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

- a. Direksi agar dapat mengevaluasi pencapaian realisasi rencana bisnis BPR secara berkala agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai target Rencana Bisnis BPR;
- b. Direksi agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran kredit;

- c. Direksi agar dapat memperhatikan Manajemen Portofolio Kredit dalam penyaluran kredit terutama kredit sindikasi agar penyaluran kredit tidak berfokus pada salah satu jenis fasilitas kredit saja;
- d. Direksi agar dapat memperhatikan debitur berkolektibilitas DPK agar tidak masuk ke dalam peningkatan NPL dan menurunkan NPL;
- e. Direksi diharapkan agar dapat menyusun strategi terhadap penyelesaian AYDA dikarenakan semua AYDA yang ada telah jatuh tempo dan belum terjual;
- f. Agar dapat meningkatkan Analisa kredit yang lebih mendalam agar tidak mempengaruhi NPL dan profil resiko kredit;
- g. Agar dapat menjadi perhatian untuk kredit 25 debitur terbesar dikarenakan rata-rata os kredit debitur diatas 1 Milyar dimana apabila salah satu mengalami gagal bayar maka akan mempengaruhi kenaikan NPL yang signifikan;
- h. Meminimalisir Faktor Manusia (Human Error). Human error memang tidak berdampak finansial bagi BPR, namun tetap menjadi perhatian Bank untuk meningkatkan kualitas SDM yang memadai dan menghindari temuan berulang oleh PE Audit Intern;
- i. Agar dapat memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit;
- j. Direksi diharapkan dapat melakukan Penerapan Strategi Anti Fraud;
- k. Agar dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap vendor sistem untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem;
- l. Agar dapat melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan bank dengan memastikan kelengkapan dan kebenaran isi laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan BPR;
- m. Direksi diharapkan untuk terus melakukan pemantauan atas penerapan APU, PPT, dan PPSPM di BPR;
- n. Direksi agar dapat memantau penyelesaian komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainya.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.		Kumala Dewi	-	-	-	-
2.		Kelly	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.		Kim Han	-	-	-	-
2.		Meri	Rp 1.000.000.000,-	20%	Rp 1.000.000.000,-	20%

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Kumala Dewi	-	-	-
2.		Kelly	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Kim Han	-	-	-
2.		Meri	602607	PT. BPR Central Sejahtera	20%
			-	PT. Energi Sejahtera	5%
			-	PT. Bintan Sumber Sejahtera	5%
			-	PT. Tajelin Sejahtera	9,54%

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Kumala Dewi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Kelly	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Kim Han	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Meri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Kumala Dewi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Kelly	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Kim Han	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Meri	Tidak Ada	Tidak Ada	Sukarni - kakak kandung

G. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	969.000.000	2	578.880.000
2.	Tunjangan	2	531.417.280	2	316.695.552
3.	Tantiem	2	133.750.000	2	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi			1.634.167.280		895.575.552

Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	2	5.760.000
4.	Fasilitas Lain	2	10.200.000	-	-
Total Fasilitas Lain			21.720.000		5.760.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1.655.887.280		901.335.552

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah dalam Perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.93 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.76 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,17 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.18 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.13 : 1

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	18 Januari 2024	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Oktober - Desember 2023
2	25 April 2024	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Januari - Maret 2024

3	18 Juli 2024	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari April - Juni 2024
4	01 Agustus 2024	2	Pembahasan Penerapan APU, PPT, dan PPSPM Tahun 2024
5	10 Oktober 2024	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Juli - September 2024
6	03 Desember 2024	2	Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2025

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1		Kim Han	6	-	100 %
2		Meri	6	-	100 %

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-

Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	2	0

Pada tahun 2024, telah diselesaikan 1 permasalahan hukum perdata di pengadilan dan dilanjutkan dengan proses lelang. Terdapat 1 permasalahan hukum Perdata (Gugatan Biasa) yang masih dalam proses persidangan pada Periode Desember 2024.

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1		Sukarni	PSP						PT. BPR Asia Sejahtera dan PT. Tajelin Sejahtera memiliki pemegang saham yang sama
		Meri	PS		Kumala Dewi	Direktur Utama	Pengadaan Sepeda Motor	Rp 18,720	

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK / NPWP	Jumlah
1.	23-24 Januari 2024	Sosial	Sumbangan untuk acara menyambut Tahun Baru Imlek 2574	Pujasera Pinang Rasa 888	-	Rp 3.000.000,-
2.	09-10 Februari 2024	Sosial	Sumbangan untuk acara menyambut Tahun Baru Imlek 2574	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)	-	Rp 2.500.000,-
3.	07 Februari 2024	Sosial	Sumbangan untuk acara Lao Yu Sheng 2024	Yayasan Hakka Sejahtera Kepri	-	Rp 2.000.000,-

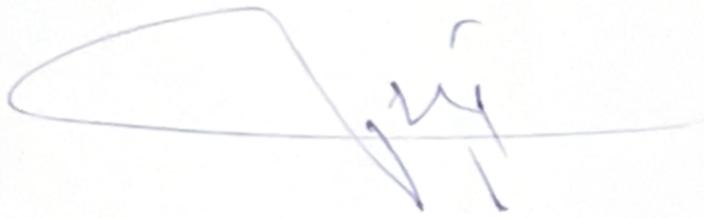
4.	27 Februari 2024	Sosial	Sumbangan untuk acara penyambutan Magha Puja 2567	Vihara Dharma Santi Tanjung Uban	-	Rp 2.000.000,-
5.	17 Mei 2024	Sosial	Sumbangan untuk acara Dharmasanti Waisak	Panitia Bersama Dharmasanti Waisak (Permabudhi)	-	Rp 2.000.000,-
6.	06-07 Agustus 2024	Sosial	Pembagian sembako untuk masyarakat yang memerlukan	Masyarakat kurang mampu dan lansia	-	Rp 5.000.000,-

Demikian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera Tahun 2024 ini kami susun dan disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Asia Sejahtera dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders untuk mengetahui secara jelas tentang kinerja BPR.

Kami akan berusaha memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari penerapan tata kelola di perusahaan kami kedepannya.

Tanjungpinang, 25 Maret 2025

PT. BPR Asia Sejahtera



KIM HAN, S.E.
Komisaris Utama



KUMALA DEWI, S.E.
Direktur Utama